
Analisis Kebijakan Pendidikan atas Instruksi Presiden Prabowo Subianto Mengenai Pengajaran Bahasa Prancis di Sekolah Indonesia

Muhaiminah Ibrahim¹, Andi Yusuf Katili²

¹Universitas Muhammadiyah Makassar

²Universitas Bina Taruna Gorontalo

muhaiminah11@gmail.com¹, yusuf2801@gmail.com²

ABSTRAK

Kajian ini dilatarbelakangi oleh munculnya wacana pengajaran bahasa Prancis sebagai bagian dari upaya memperkuat kompetensi global peserta didik serta mendukung hubungan bilateral Indonesia dan Prancis dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai pengajaran bahasa Prancis di sekolah Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi literatur yang bersumber dari regulasi pendidikan, dokumen pemerintah, jurnal ilmiah, buku, serta berbagai referensi yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual kebijakan pengajaran bahasa Prancis sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan tuntutan globalisasi pendidikan. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan kompetensi multibahasa peserta didik, memperluas akses pendidikan internasional, memperkuat diplomasi pendidikan, serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan guru bahasa Prancis, belum tersedianya kurikulum nasional yang spesifik, keterbatasan sarana pembelajaran, dan kebutuhan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi secara bertahap melalui sekolah-sekolah yang memiliki kesiapan sumber daya menjadi alternatif yang lebih realistis. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan regulasi teknis, penguatan kapasitas guru, dan pengembangan kurikulum yang adaptif guna mendukung keberhasilan kebijakan.

Kata Kunci: **Kebijakan Pendidikan; Bahasa Prancis; Diplomasi Pendidikan; Implementasi Kebijakan; Globalisasi Pendidikan**

ABSTRACT

The study is motivated by the emergence of the policy discourse as part of efforts to strengthen students' global competencies and support bilateral relations between Indonesia and France in the fields of education and culture. This study aims to analyze the educational policy related to President Prabowo Subianto's instruction regarding the teaching of French language in Indonesian schools. This research employs a qualitative approach using a policy analysis method. Data were collected through document analysis and literature review derived from educational regulations, government documents, scientific journals, books, and other relevant references. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that conceptually, the policy of teaching French is aligned with the objectives of the national education system and the demands of educational globalization. The policy has the potential to improve students' multilingual competencies, expand access to international education, strengthen educational diplomacy, and enhance the global competitiveness of Indonesian human resources. However, its implementation faces several challenges, including the limited availability of French language teachers, the absence of a specific national curriculum, inadequate learning facilities, and substantial budget requirements. Therefore, gradual implementation through schools with adequate resources is considered a more realistic alternative. The study recommends the formulation of technical regulations, strengthening teacher capacity, and developing adaptive curricula to support successful policy implementation.

Keywords: *Educational Policy; French Language; Educational Diplomacy; Policy Implementation; Educational Globalization*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan bangsa yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing nasional, serta mempersiapkan generasi muda menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Dalam era globalisasi, penguasaan bahasa asing menjadi salah satu kompetensi penting yang diperlukan untuk mendukung mobilitas pendidikan, kerja sama internasional, pengembangan ilmu pengetahuan, serta interaksi ekonomi lintas negara. Oleh karena itu, berbagai negara terus melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan, termasuk dalam aspek pengajaran bahasa asing, guna menjawab kebutuhan masyarakat global yang terus berkembang (OECD, 2023).

Di Indonesia, kebijakan pendidikan senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Pemerintah berupaya menyesuaikan sistem pendidikan nasional agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi abad ke-21, termasuk kemampuan komunikasi multibahasa. Selama ini, bahasa Inggris menjadi bahasa asing utama yang diajarkan di berbagai jenjang pendidikan karena posisinya sebagai *lingua franca* internasional. Selain bahasa Inggris, beberapa sekolah juga telah memperkenalkan bahasa asing lain seperti bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan bahasa Korea sesuai kebutuhan institusi maupun minat peserta didik (Kemendikbudristek, 2022).

Perkembangan terbaru dalam kebijakan pendidikan Indonesia muncul ketika Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan instruksi agar bahasa Prancis dipelajari pada seluruh tingkatan sekolah di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Emmanuel Macron di Paris pada Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa seluruh sekolah di Indonesia perlu mempelajari bahasa Prancis sebagai bagian dari upaya menghadapi perkembangan dunia di masa depan. Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan akademisi, praktisi pendidikan, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas.

Instruksi Presiden mengenai pengajaran bahasa Prancis pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konteks hubungan bilateral Indonesia dan Prancis yang semakin berkembang dalam berbagai sektor strategis, seperti pertahanan, teknologi, ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan. Pemerintah Indonesia dan Prancis dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan kerja sama yang signifikan, termasuk dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan pertukaran pendidikan. Penguasaan bahasa Prancis dipandang dapat menjadi modal penting untuk memperluas akses generasi muda Indonesia terhadap peluang pendidikan tinggi, kerja sama riset, diplomasi internasional, serta pasar kerja global yang melibatkan negara-negara berbahasa Prancis (*Francophonie*) (Organisation Internationale de la Francophonie, 2023).

Bahasa Prancis sendiri merupakan salah satu bahasa internasional yang memiliki posisi penting dalam komunikasi global. Menurut Organisation Internationale de la Francophonie (2023), bahasa Prancis digunakan oleh lebih dari

320 juta penutur di berbagai negara dan menjadi salah satu bahasa resmi pada berbagai organisasi internasional seperti *United Nations*, *UNESCO*, *European Union*, serta berbagai lembaga diplomatik internasional lainnya. Dari perspektif ekonomi dan geopolitik, penguasaan bahasa Prancis juga dianggap mampu membuka peluang kerja dan kolaborasi internasional yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia.

Meskipun demikian, kebijakan pengajaran bahasa asing dalam sistem pendidikan nasional tidak dapat diputuskan semata-mata berdasarkan pertimbangan diplomatik atau hubungan bilateral antarnegara. Sebagai sebuah kebijakan publik, pengajaran bahasa asing harus mempertimbangkan berbagai aspek penting, seperti kebutuhan peserta didik, kesiapan tenaga pendidik, ketersediaan kurikulum, dukungan anggaran, infrastruktur pendidikan, serta relevansi dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, instruksi Presiden mengenai pembelajaran bahasa Prancis perlu dianalisis secara komprehensif agar dapat diketahui sejauh mana kebijakan tersebut memiliki landasan yang kuat dan peluang implementasi yang efektif dalam sistem pendidikan Indonesia.

Dalam perspektif kebijakan publik, suatu kebijakan idealnya disusun melalui proses formulasi yang melibatkan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, konsultasi dengan pemangku kepentingan, penyusunan alternatif kebijakan, hingga evaluasi dampak yang mungkin ditimbulkan (Dunn, 2018). Proses tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, muncul pertanyaan akademik mengenai bagaimana kedudukan instruksi Presiden tersebut dalam proses kebijakan pendidikan nasional serta bagaimana mekanisme implementasinya apabila benar-benar diterapkan secara luas di seluruh sekolah Indonesia.

Selain itu, kebijakan pengajaran bahasa Prancis juga perlu dilihat dari perspektif tata kelola pendidikan (*educational governance*). Dalam sistem pendidikan Indonesia, perubahan kurikulum dan penambahan mata pelajaran baru memerlukan koordinasi yang melibatkan berbagai institusi, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, hingga lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan substansi pembelajaran, tetapi juga menyangkut pengadaan guru, penyusunan bahan ajar,

pelatihan tenaga pendidik, serta evaluasi hasil belajar peserta didik (Prabowo et al., 2024), (Tilaar & Nugroho, 2016).

Tantangan implementasi kebijakan ini menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan kondisi aktual pendidikan Indonesia. Berdasarkan berbagai laporan pendidikan nasional, masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan tenaga pengajar bahasa asing, serta perbedaan akses terhadap fasilitas pembelajaran modern. Bahkan, penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa asing utama masih menjadi tantangan di banyak daerah. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan sistem pendidikan nasional dalam mengadopsi pengajaran bahasa Prancis secara lebih luas dan merata.

Di sisi lain, sejumlah pihak memandang bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Kemampuan multibahasa diyakini dapat meningkatkan kompetensi global peserta didik, memperluas wawasan budaya, serta meningkatkan daya saing lulusan Indonesia dalam dunia internasional. Penelitian menunjukkan bahwa penguasaan lebih dari satu bahasa asing dapat meningkatkan kemampuan kognitif, kreativitas, fleksibilitas berpikir, dan keterampilan komunikasi lintas budaya (Bialystok, 2021). Dengan demikian, pengajaran bahasa Prancis berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pendidikan global di Indonesia.

Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang baik, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya. Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarinstansi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya. Dalam konteks kebijakan pengajaran bahasa Prancis, seluruh faktor tersebut perlu diperhatikan agar kebijakan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi mampu menghasilkan perubahan nyata dalam sistem pendidikan nasional.

Kajian terhadap instruksi Presiden mengenai pengajaran bahasa Prancis juga menarik untuk dianalisis dari perspektif diplomasi pendidikan (*education diplomacy*). Dalam hubungan internasional modern, pendidikan sering digunakan sebagai instrumen *soft power* untuk memperkuat hubungan antarnegara. Pengajaran bahasa asing tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media penyebaran budaya, nilai, dan pengaruh suatu negara (Nye, 2021). Oleh

karena itu, kebijakan ini dapat dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Prancis melalui jalur pendidikan dan kebudayaan.

Selain aspek diplomasi, kajian ini juga relevan dalam konteks kebijakan pendidikan berbasis kebutuhan nasional. Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar membutuhkan kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan nasional. Dalam hal ini, perlu dikaji apakah pengajaran bahasa Prancis merupakan kebutuhan prioritas dalam sistem pendidikan Indonesia ataukah lebih tepat diterapkan secara selektif pada sekolah-sekolah tertentu yang memiliki orientasi internasional dan kerja sama global.

Perdebatan mengenai kebijakan pengajaran bahasa asing sebenarnya bukan hal baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Berbagai bahasa asing telah diperkenalkan dalam kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler sekolah dengan tujuan meningkatkan kompetensi peserta didik. Akan tetapi, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan sumber daya dan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, analisis terhadap instruksi Presiden Prabowo mengenai pengajaran bahasa Prancis menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam konteks tata kelola pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan karena membahas fenomena kebijakan pendidikan yang aktual dan memiliki implikasi strategis terhadap masa depan pendidikan Indonesia. Kajian ini tidak hanya berupaya memahami substansi instruksi Presiden mengenai pengajaran bahasa Prancis, tetapi juga menganalisis aspek formulasi kebijakan, kesiapan implementasi, tantangan yang dihadapi, serta potensi dampaknya terhadap sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu kebijakan publik dan kebijakan pendidikan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Indonesia di era globalisasi.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan, tindakan, dan program yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan publik serta mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengarahkan kehidupan masyarakat melalui berbagai regulasi, program, maupun tindakan administratif. Menurut Thomas R. Dye (2017), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini menunjukkan bahwa setiap tindakan maupun ketidaktindakan pemerintah memiliki implikasi kebijakan yang dapat memengaruhi masyarakat.

Sementara itu, William N. Dunn (2018) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan pola tindakan yang saling berkaitan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik melalui proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dalam konteks pendidikan, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan negara.

Kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pengajaran bahasa Prancis di sekolah Indonesia dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik karena melibatkan keputusan pemerintah yang berdampak pada sistem pendidikan nasional. Kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kurikulum, tetapi juga menyangkut pengelolaan sumber daya pendidikan, pendanaan, tenaga pendidik, serta pencapaian tujuan pembangunan sumber daya manusia.

Konsep Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan mencakup berbagai aspek seperti kurikulum, tenaga pendidik, pembiayaan pendidikan, manajemen sekolah, serta pengembangan kompetensi peserta didik.

Menurut H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2016), kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Teori Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan merupakan proses intelektual yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan publik. Menurut Dunn (2018), analisis kebijakan bertujuan untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti empiris sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dunn mengemukakan lima tahapan analisis kebijakan, yaitu: 1. Perumusan Masalah (Problem Structuring); 2. Peramalan (Forecasting); 3. Rekomendasi Kebijakan (Recommendation); 4. Monitoring; 5. Evaluasi

Teori ini relevan digunakan untuk menganalisis sejauh mana instruksi Presiden Prabowo memiliki dasar kebijakan yang kuat serta bagaimana prospek implementasinya dalam sistem pendidikan Indonesia.

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses penerjemahan keputusan politik menjadi tindakan nyata yang menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama: 1. Standar dan Tujuan Kebijakan; 2. Sumber Daya; 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana; 4. Komunikasi Antar Organisasi; 5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik; 6. Disposisi Pelaksana

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan memengaruhi efektivitas implementasi. Dalam penelitian ini, teori Van Meter dan Van Horn digunakan untuk menganalisis kesiapan implementasi pengajaran bahasa Prancis di sekolah Indonesia.

Teori Diplomasi Pendidikan (*Educational Diplomacy*)

Diplomasi pendidikan merupakan penggunaan sektor pendidikan sebagai instrumen hubungan internasional. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga sebagai alat diplomasi yang dapat memperkuat hubungan antarnegara.

Menurut Joseph S. Nye Jr. (2021), pendidikan merupakan salah satu instrumen soft power yang memungkinkan suatu negara memengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai sosial.

Dalam konteks hubungan Indonesia dan Prancis, pengajaran bahasa Prancis dapat dipahami sebagai bagian dari kerja sama pendidikan bilateral yang bertujuan

memperkuat hubungan kedua negara melalui peningkatan pertukaran budaya, akademik, dan profesional.

Teori Multilingualisme dalam Pendidikan

Multilingualisme adalah kemampuan individu menggunakan lebih dari satu bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era globalisasi, kemampuan multilingual menjadi salah satu kompetensi yang sangat dibutuhkan.

Menurut Ellen Bialystok (2021), pembelajaran lebih dari satu bahasa asing memberikan manfaat berupa: 1. Peningkatan kemampuan kognitif; 2. Peningkatan kemampuan memecahkan masalah; 3. Fleksibilitas berpikir yang lebih baik; 4. Kemampuan komunikasi lintas budaya; 5. Peningkatan daya saing global.

Bahasa Prancis sebagai salah satu bahasa internasional berpotensi memberikan manfaat tersebut kepada peserta didik Indonesia. Namun, keberhasilan pembelajaran bahasa asing sangat dipengaruhi oleh kualitas guru, metode pembelajaran, dan lingkungan belajar yang mendukung.

Kebijakan Pengajaran Bahasa Asing dalam Sistem Pendidikan Indonesia

Pengajaran bahasa asing telah menjadi bagian dari sistem pendidikan Indonesia sejak lama. Bahasa Inggris merupakan bahasa asing utama yang diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, beberapa sekolah juga mengajarkan bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Jerman, dan Korea sebagai mata pelajaran pilihan atau kegiatan ekstrakurikuler.

Kebijakan pengajaran bahasa asing bertujuan untuk: 1. Meningkatkan kompetensi komunikasi internasional peserta didik; 2. Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Memperkuat daya saing global lulusan; 4. Mendukung kerja sama internasional.

Dalam implementasinya, kebijakan bahasa asing di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan guru, ketimpangan akses pendidikan, dan perbedaan kualitas pembelajaran antarwilayah. Oleh karena itu, rencana pengajaran bahasa Prancis secara luas memerlukan kajian mendalam mengenai kesiapan sistem pendidikan nasional.

Sintesis Kajian Teori

Berdasarkan berbagai teori yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai pengajaran bahasa Prancis di sekolah Indonesia merupakan fenomena kebijakan pendidikan yang dapat

dianalisis melalui pendekatan kebijakan publik, implementasi kebijakan, diplomasi pendidikan, human capital, dan globalisasi pendidikan.

Teori Kebijakan Publik dari Dunn (2018) digunakan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan. Teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) digunakan untuk mengkaji kesiapan pelaksanaan kebijakan. Teori Soft Power dari Nye (2021) digunakan untuk menjelaskan aspek diplomasi pendidikan, sedangkan Teori Human Capital dari Becker (1993) digunakan untuk melihat kontribusi penguasaan bahasa Prancis terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Melalui sintesis teori tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan apakah instruksi Presiden mengenai pengajaran bahasa Prancis memiliki landasan kebijakan yang kuat, bagaimana kesiapan implementasinya dalam sistem pendidikan nasional, serta bagaimana potensi dampaknya terhadap pengembangan sumber daya manusia Indonesia di era global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan (*policy analysis*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan secara mendalam kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai pengajaran bahasa Prancis di sekolah Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena kebijakan secara komprehensif berdasarkan dokumen, regulasi, pernyataan resmi pemerintah, serta berbagai sumber literatur yang relevan.

Menurut John W. Creswell (2018), penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sementara itu, analisis kebijakan digunakan untuk menilai proses formulasi, implementasi, dan potensi dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat (Dunn, 2018).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena kebijakan yang diteliti sekaligus menganalisis berbagai aspek yang memengaruhi keberhasilan maupun tantangan implementasinya dalam sistem pendidikan nasional.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu: primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2022), penggunaan data primer dan sekunder secara

bersamaan dapat meningkatkan validitas hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: studi dokumentasi dan studi literatur.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña (2014), yang terdiri atas tiga tahapan utama: 1. Reduksi Data (*Data Reduction*); 2. Penyajian Data (*Data Display*); 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing*).

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian, digunakan teknik uji keabsahan data sebagai berikut: 1. Triangulasi Sumber; 2. Triangulasi Teori; 3.

Tabel 1. Definisi Operasional Penelitian

Variabel/Konsep	Definisi Operasional	Indikator
Formulasi Kebijakan	Proses perumusan kebijakan	Tujuan, dasar hukum, aktor kebijakan
Implementasi Kebijakan	Pelaksanaan kebijakan dalam sistem pendidikan	Guru, kurikulum, sarana, anggaran
Dampak Kebijakan	Pengaruh kebijakan terhadap pendidikan nasional	Kompetensi siswa, diplomasi pendidikan, daya saing global
Evaluasi Kebijakan	Penilaian terhadap efektivitas kebijakan	Kesesuaian tujuan dan hasil implementasi

Sumber: Olahan peneliti

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan salah satu instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing global. Dalam konteks globalisasi dan diplomasi internasional, penguasaan bahasa asing menjadi kebutuhan yang semakin penting untuk mendukung kerja sama antarnegara, mobilitas akademik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, berbagai negara terus mengembangkan kebijakan pendidikan yang mampu menyesuaikan kebutuhan global tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

Dalam perkembangan terbaru, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan instruksi mengenai pentingnya pengajaran bahasa Prancis pada berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Pernyataan tersebut muncul dalam konteks penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis, khususnya pada bidang pendidikan, kebudayaan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Instruksi tersebut memunculkan berbagai respons dari kalangan akademisi, praktisi pendidikan, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Sebagian pihak memandang kebijakan tersebut sebagai langkah progresif untuk memperluas kompetensi global peserta didik Indonesia, sementara pihak lain mempertanyakan kesiapan sistem pendidikan nasional dalam mengimplementasikan pengajaran bahasa Prancis secara luas.

Tabel 2. Tujuan Kebijakan Pengajaran Bahasa Prancis

No Tujuan Kebijakan

- 1 Meningkatkan kompetensi bahasa asing peserta didik
- 2 Mendukung diplomasi pendidikan Indonesia
- 3 Memperluas akses pendidikan internasional
- 4 Meningkatkan daya saing global lulusan
- 5 Memperkuat kerja sama Indonesia–Prancis

Tujuan tersebut sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing internasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.

Secara konseptual, pengajaran bahasa Prancis tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional karena dapat mendukung: 1. Pengembangan kompetensi global; 2. Peningkatan literasi internasional; 3. Penguatan keterampilan komunikasi lintas budaya. Namun demikian, implementasi kebijakan harus tetap mempertimbangkan prioritas pendidikan nasional dan kondisi riil sekolah-sekolah di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan terbesar implementasi kebijakan ini adalah keterbatasan guru bahasa Prancis.

Tabel 3. Analisis Ketersediaan Guru Bahasa Prancis

Aspek	Kondisi Saat Ini
Jumlah guru bahasa Inggris	Sangat banyak
Jumlah guru bahasa Prancis	Terbatas
Sebaran guru bahasa Prancis	Terkonsentrasi di kota besar

Aspek	Kondisi Saat Ini
--------------	-------------------------

Program pendidikan guru bahasa Prancis	Masih terbatas
----------------------------------------	----------------

Sumber: Olahan Peneliti

Sebagian besar sekolah di Indonesia belum memiliki guru bahasa Prancis sehingga diperlukan strategi khusus berupa: 1. Pelatihan guru; 2. Kerja sama dengan universitas; 3. Program pertukaran tenaga pengajar; 4. Pemanfaatan pembelajaran digital.

Tabel 4. Analisis Kesiapan Kurikulum

Indikator	Kondisi
Kurikulum bahasa Prancis nasional	Belum tersedia
Modul pembelajaran	Terbatas
Buku ajar	Masih sedikit
Standar kompetensi	Perlu dirumuskan

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel 5. Kesiapan Sarana Pembelajaran

Sarana	Tingkat Ketersediaan
Laboratorium bahasa	Sedang
Internet sekolah	Beragam
Media digital	Sedang
Buku bahasa Prancis	Rendah

Sumber: Olahan Peneliti

Kesenjangan fasilitas antarwilayah menjadi salah satu tantangan implementasi kebijakan secara nasional.

Analisis Dampak Kebijakan

Dampak positif Peningkatan Kompetensi Global Penguasaan bahasa Prancis dapat meningkatkan kemampuan komunikasi internasional peserta didik. Peningkatan Peluang Pendidikan. Penguatan Diplomasi Pendidikan. Peningkatan Daya Saing SDM.

Tabel 6. Potensi Tantangan Kebijakan

No Tantangan

- 1 Kekurangan guru bahasa Prancis

No Tantangan

- 2 Keterbatasan anggaran
- 3 Ketidaksiapan kurikulum
- 4 Ketimpangan fasilitas pendidikan
- 5 Rendahnya minat peserta didik di beberapa daerah

Sumber: Olahan Peneliti

Apabila tidak dikelola dengan baik, tantangan tersebut dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Pembahasan

Perspektif Kebijakan Publik

Menurut teori Dunn (2018), kebijakan publik yang efektif harus memiliki:

- tujuan yang jelas;
- dukungan sumber daya;
- mekanisme implementasi yang terukur.

Instruksi Presiden mengenai pengajaran bahasa Prancis memiliki tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan kompetensi global peserta didik dan memperkuat hubungan internasional Indonesia. Namun, dari perspektif kebijakan publik, instruksi tersebut masih memerlukan proses formulasi lebih lanjut dalam bentuk regulasi teknis agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Perspektif Implementasi Kebijakan

Teori Van Meter dan Van Horn (1975) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sumber daya dan kapasitas organisasi pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan implementasi masih menghadapi kendala pada aspek: 1. Guru; 2. Kurikulum; 3. Sarana; 4. Pendanaan.

Dengan demikian, implementasi bertahap lebih realistis dibandingkan penerapan secara nasional dalam waktu singkat.

Perspektif Diplomasi Pendidikan

Menurut teori Soft Power dari Joseph S. Nye Jr., pendidikan merupakan instrumen penting dalam membangun hubungan internasional. Kebijakan pengajaran bahasa Prancis dapat dipandang sebagai bentuk diplomasi pendidikan yang bertujuan: 1. Memperkuat hubungan Indonesia–Prancis; 2. Meningkatkan

mobilitas akademik; 3. memperluas jaringan kerja sama internasional. Dari perspektif ini, kebijakan memiliki nilai strategis yang cukup tinggi.

Perspektif Human Capital

Menurut teori Human Capital dari Gary S. Becker, pendidikan merupakan investasi yang menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pengajaran bahasa Prancis berpotensi: 1. Meningkatkan kompetensi peserta didik; 2. Memperluas peluang kerja; 3. Meningkatkan daya saing global.

Namun manfaat tersebut hanya dapat diperoleh apabila kebijakan diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa: 1. Instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai pengajaran bahasa Prancis merupakan bagian dari strategi diplomasi pendidikan dan penguatan kompetensi global peserta didik; 2. Secara konseptual, kebijakan ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan tuntutan globalisasi Pendidikan; 3. Implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek tenaga pendidik, kurikulum, sarana, dan pendanaan; 4. Model implementasi bertahap melalui sekolah unggulan, sekolah internasional, dan program peminatan dinilai lebih realistis dibandingkan penerapan wajib secara nasional; 5. Pengajaran bahasa Prancis berpotensi meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia dalam konteks global apabila didukung oleh perencanaan yang matang dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai pengajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi serta mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis. Kebijakan tersebut dilandasi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi global peserta didik melalui penguasaan bahasa asing yang memiliki peran penting dalam diplomasi internasional, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan. Dari perspektif kebijakan publik, instruksi tersebut menunjukkan adanya orientasi pemerintah untuk mengembangkan pendidikan yang lebih terbuka terhadap dinamika global. Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan pemanfaatan sektor pendidikan sebagai instrumen diplomasi lunak (soft power) guna memperkuat kerja sama internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan; 2. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengajaran bahasa Prancis tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penguasaan bahasa asing dapat mendukung pengembangan kompetensi peserta didik dalam aspek komunikasi, literasi global, pemahaman lintas budaya, serta peningkatan daya saing internasional. Kebijakan ini juga sejalan dengan konsep pendidikan abad ke-21 yang menekankan pentingnya keterampilan komunikasi global, kolaborasi internasional, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dunia yang semakin kompleks; 3. Meskipun memiliki tujuan yang positif, implementasi pengajaran bahasa Prancis secara luas di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Tantangan utama meliputi keterbatasan jumlah guru bahasa Prancis, belum tersedianya kurikulum nasional yang spesifik, minimnya bahan ajar dan media pembelajaran, serta ketimpangan sarana pendidikan antarwilayah. Selain itu, implementasi kebijakan juga membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar untuk pengembangan kurikulum, pelatihan guru, penyediaan bahan ajar, serta penguatan infrastruktur pembelajaran bahasa asing. Oleh karena itu, penerapan kebijakan secara nasional dalam waktu singkat dinilai belum sepenuhnya realistis tanpa adanya persiapan yang matang; 4. Penelitian ini menemukan bahwa pengajaran bahasa Prancis berpotensi meningkatkan kompetensi global peserta didik Indonesia. Penguasaan bahasa Prancis dapat membuka akses terhadap peluang pendidikan internasional, program pertukaran pelajar, beasiswa luar negeri, kerja sama akademik, serta kesempatan kerja pada sektor internasional. Selain itu, kemampuan multibahasa dapat meningkatkan kemampuan kognitif, keterampilan komunikasi lintas budaya, dan daya saing lulusan Indonesia di pasar kerja global. Dengan demikian, kebijakan ini dapat menjadi salah satu instrumen pengembangan modal manusia (human capital) yang mendukung pembangunan nasional jangka Panjang; 5. Berdasarkan hasil analisis, implementasi pengajaran bahasa Prancis lebih tepat dilakukan secara bertahap melalui sekolah-sekolah yang memiliki kesiapan sumber daya, seperti sekolah unggulan, sekolah internasional, sekolah berbasis kerja sama luar negeri, serta sekolah yang memiliki program peminatan bahasa asing. Pendekatan bertahap memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan sebelum diterapkan secara lebih luas. Selain itu, pendekatan ini dapat mengurangi risiko kegagalan implementasi akibat keterbatasan sumber daya pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah perlu menyusun regulasi teknis yang menjelaskan tujuan, ruang lingkup, tahapan implementasi, mekanisme pelaksanaan, serta indikator keberhasilan pengajaran bahasa Prancis dalam sistem pendidikan nasional; 2. Pengajaran bahasa Prancis sebaiknya diterapkan secara bertahap melalui sekolah-sekolah yang memiliki kesiapan sumber daya. Model implementasi bertahap akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan; 3. Pemerintah perlu memperluas program pendidikan dan pelatihan guru bahasa Prancis melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga bahasa, serta institusi pendidikan dari Prancis; 4. Kementerian Pendidikan perlu menyusun kurikulum bahasa Prancis yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik Indonesia serta mengembangkan bahan ajar yang kontekstual dan mudah diakses; 5. Pemanfaatan platform pembelajaran daring dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan guru dan bahan ajar, khususnya di daerah yang belum memiliki tenaga pengajar bahasa Prancis; 6. Pemerintah perlu memperluas kerja sama pendidikan melalui program pertukaran pelajar, pertukaran guru, beasiswa, penelitian bersama, dan pengembangan pusat pembelajaran bahasa Prancis di Indonesia; 7. Setiap tahap implementasi perlu dievaluasi secara berkala guna mengetahui efektivitas kebijakan dan mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Bialystok, E. (2021). *Bilingualism in development: Language, literacy, and cognition*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

- Elfert, M., & Ydesen, C. (2023). UNESCO, the OECD and the World Bank: A global governance perspective. In *Global Governance of Education* (pp. 23–50). Springer.
- Giddens, A. (2014). *The consequences of modernity*. Polity Press.
- Head, B. W. (2016). Toward more evidence-informed policy making. *Public Administration Review*, 76(3), 472–484.
- Kemendikbudristek. (2022). *Kurikulum Merdeka dan transformasi pendidikan Indonesia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mitchell, G., Chojimah, N., & Nurhayani, I. (2022). Directions for Indonesian language policy in education: Towards a translingual perspective. *NOBEL: Journal of Literature and Language Teaching*, 13(2), 271–292. <https://doi.org/10.15642/NOBEL.2022.13.2.271-292>
- Nye, J. S. (2021). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- OECD. (2023). *Education at a glance 2023: OECD indicators*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Equity and inclusion in education: Finding strength through diversity*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e9072e21-en>
- OECD. (2023). *OECD digital education outlook 2023: Towards an effective digital education ecosystem*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c74f03de-en>
- OECD. (2023). *Shaping digital education: Enabling factors for quality, equity and efficiency*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bac4dc9f-en>
- OECD. (2023). *Country digital education ecosystems and governance: A companion to digital education outlook 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/906134d4-en>
- OECD. (2024). *Transforming education in Indonesia: Examining the landscape of current reforms*. OECD Education Policy Perspectives, No. 88. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9ff8d407-en>
- Organisation Internationale de la Francophonie. (2023). *La langue française dans le monde*. OIF.
- Prabowo, Hafid, A. N., & Bayani, M. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Sekolah Dasar Prespektif Lingkungan Pendidikan Sekolah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 8324–8334. <https://j->

innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13890

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Taba, H. (1962). *Curriculum development: Theory and practice*. Harcourt, Brace & World.

Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2016). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.

UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education—A tool on whose terms?* UNESCO Publishing.

UNESCO. (2024). *Global education monitoring report 2024/25: Leadership in education*. UNESCO Publishing.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.